

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian khususnya di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara agraris dan mempunyai sumber daya alam yang melimpah sehingga mampu menghasilkan produk pertanian dalam jumlah besar, seperti bahan makanan dan bahan mentah yang dapat digunakan sebagai bahan produksi. Sektor pertanian juga merupakan sektor dengan sumber pendapatan paling tinggi karena hampir sebagian mata pencaharian penduduk Indonesia sebagai petani. Berikut tiga lapangan pekerjaan utama menurut data Badan Pusat Statistik Tahun 2022¹ :

Tabel 1.1 Lapangan Pekerjaan Utama

Lapangan pekerjaan utama	Total
Pertanian, kehutanan, dan perikanan	37.130.676
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	25.736.110
Industri pengolahan	18.694.463

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2022

Dari tabel 1.1 lapangan pekerjaan utama sektor pertanian merupakan sektor dengan mata pencaharian terbesar penduduk Indonesia dengan total 37.130.676 dan

¹ Statistik Indonesia Tahun 2022, hal : 109

urutan kedua mayoritas penduduk Indonesia yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor berjumlah 25.736.110.

Selain itu, pertanian merupakan salah satu sektor yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian nasional, hal ini dapat terlihat dari Produk Domestik Bruto sektor pertanian atas dasar harga berlaku pada Tahun 2022 yaitu sebesar 12,40% atau mengalami penurunan sebesar 0,88% dibandingkan tahun sebelumnya. Penghasil PDB terbesar sektor pertanian pada Tahun 2022 adalah tanaman pangan (3,76%), perikanan (2,58%), tanaman pangan (2,32%), peternakan (1,52%), hortikultura (1,44%), kehutanan (0,06%), jasa pertanian dan perburuan (0,18%)².

Pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusan dalam pembangunan sektor pertanian, salah satunya dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan atau Mesin Pertanian³. Dalam hal ini penggunaan alat dan atau mesin pertanian yang layak pakai bisa menjadi faktor meningkatnya hasil produksi pertanian dan meningkatkan pendapatan para petani, serta melestarikan sumber daya alam. Pentingnya penggunaan alat dan atau mesin pertanian yang layak pakai tersebut maka perlu dikeluarkannya peraturan sebagai pedoman mulai dari pengadaan alat dan atau mesin pertanian hingga penggunaan alat dan atau mesin pertanian oleh petani.

² Badan Pusat Statistik. 2023. Indikator Pertanian 2022. Hal 22

³ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 Tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan atau Mesin Pertanian

Upaya Pemerintah Pusat dalam melakukan pembangunan pertanian menghadapi masalah yang mendasar seperti kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, infrastruktur, sarana dan prasarana, lahan serta permasalahan utama yang berkaitan dengan komoditas padi yaitu kesempatan untuk menjual barang dan jasa yang di produksi lebih banyak dan semakin terbuka besar peluangnya serta rendahnya tingkat penguasaan lahan usaha tani⁴. Masih terdapat permasalahan lainnya di sektor pertanian diantaranya yaitu masalah permodalan mulai dari masa tanam hingga proses panen padi, lahan pertanian semakin sulit, teknologi pertanian modern, permasalahan pupuk pertanian yang mahal dan yang terakhir yaitu pemasaran dari hasil produk pertanian⁵.

Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia termasuk ke dalam salah satu provinsi yang memiliki keanekaragaman hayati. Sumatera Barat memiliki wilayah yang sebagian besarnya hutan tropis serta memiliki wilayah pertanian dan perkebunan yang luas. Selain memiliki keanekaragaman hayati dan luas wilayah pertanian, Sumatera Barat juga memiliki penduduk yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2022 menurut lapangan

⁴ Pusat Sosial Ekonomi dan KebijakanPertanian. 2019.Permasalahan, Tantangan dan Kebijakan Pembangunan Pertanian 2020-2024

⁵Misekta : “Permasalahan yang Terjadi pada Sektor Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia”, <https://misekta.id/news/permasalahan-yang-terjadi-pada-sektor-sosial-ekonomi-pertanian-indonesia#:~:text=Masalah%20pertama%20adalah%20permodalan%2C%20kedua,lahan%20di%20Indonesia%20makin%20sempit>, diakses pada 30 Agustus 2023, pukul 14.20 WIB.

pekerjaan utama, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih dominan yaitu 895,67 ribu orang⁶.

Selain itu, pertumbuhan perekonomian di Sumatera Barat juga salah satunya dipengaruhi oleh sektor pertanian yang dapat dilihat pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Barat. Berikut laju dan sumber pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat menurut lapangan usaha Triwulan IV-2022 Tahun Dasar 2010⁷ :

Tabel 1.2 Berikut Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Triwulan IV-2022 Tahun Dasar 2010 (Persen)

No.	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Triwulan IV-2022			Sumber Pertumbuhan 2022
		Triw IV-2022 Terhadap Triw III-2022	Triw IV-2022 Terhadap Triw IV-2021	Tahun 2022 Terhadap Tahun 2021	
1.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,80	3,85	5,60	0,93
2.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,32	5,59	3,52	0,78
3.	Informasi dan Komunikasi	0,03	8,51	7,02	0,60
4.	Transportasi dan Pergudangan	2,98	5,40	5,73	0,59

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

⁶ Badan Pusat Statistik Sumatera Barat.2022. Ketenagakerjaan, hal : 133

⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan Provinsi Sumatera Barat dipengaruhi beberapa sektor diantaranya sektor pertanian berada diposisi kedua setelah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Namun kondisi tersebut tidak mempengaruhi luas panen tanaman padi di Sumatera Barat berdasarkan data 3 tahun terakhir mengalami penurunan sesuai tabel 1.3 berikut ini⁸ :

Tabel 1.3 Luas Panen Tanaman Padi Sumatera Barat

No.	Tahun	Luas (Ha)
1.	2019	311 671,23
2.	2020	295 664,47
3.	2021	272 391,95

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2019-2021

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan luas panen padi di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir, hal ini disebabkan oleh masalah alih fungsi lahan pertanian untuk nonpertanian, permodalan dan permasalahan lainnya. Salah satu daerah di Sumatera Barat yang sektor pertaniannya bagus adalah Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya hasil produksi beras Kabupaten Tanah Datar juga mampu memenuhi kebutuhan lokalnya dan bahkan mampu mengirimkan ke kabupaten dan provinsi tetangga, sebagaimana tabel berikut ini:

⁸ Ibid. Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan, hal 421

Tabel 1.4 Produksi Beras Menurut Kabupaten/Kota Hasil KSA (Ton)

No.	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Kabupaten Tanah Datar	100587,71	105709,95	98365,01
2.	Kabupaten Agam	98812,02	88362,79	79692,89
3.	Kabupaten Solok	89669,77	99207,04	103828,10
4.	Kabupaten Pasaman	86046,02	75058,35	83443,24
5.	Kabupaten Padang Pariaman	83437,63	66894,07	78210,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Tabel 1.4 menunjukkan Kabupaten Tanah Datar merupakan kabupaten penghasil beras terbanyak disusul Kabupaten Agam. Meskipun mengalami penurunan tetapi Kabupaten Tanah Datar mampu memenuhi Kebutuhan lokal terhadap beras. Selanjutnya Kabupaten Tanah Datar memiliki luas lahan pertanian yaitu 22.945 Ha yang tersebar pada 14 Kecamatan. Selain itu, Kabupaten Tanah Datar juga memiliki jumlah penduduk yang 80% bekerja di sektor pertanian berdasarkan data penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama Tahun 2021 berikut ini⁹:

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2021

No.	Lapangan usaha	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Pertanian	48.668	30.920	79.588
2.	Manufaktur	14.388	3.945	18.333
3.	Jasa	33.198	34.564	67.762
Total		96.254	69.429	165.83

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar. 2022. Kabupaten Tanah Datar dalam Angka. Hal 111

Dari tabel 1.5 terlihat Kabupaten Tanah Datar berpenduduk 79.588 jiwa yang sebagian besar bekerja pada sektor pertanian, sedangkan yang bekerja pada sektor industri hanya 18.333 jiwa. Oleh sebab itu, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Tanah Datar karena sektor pertanian merupakan sektor yang berperan terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Tanah Datar. Berikut presentase PDRB Kabupaten Tanah Datar¹⁰ :

Tabel 1.6 Presentase PDRB Kabupaten Tanah Datar

No	Lapangan usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	30,66	29,77	29,82	28,57	27,81
2	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil, dan sepeda motor	13,42	13,49	13,36	13,19	13,89
3	Industri pengolahan besar	11,03	10,50	10,48	10,72	10,68
4	Konstruksi	10,17	10,29	10,09	10,42	10,43
5	Transportasi dan pergudangan	8,73	9,09	8,46	8,58	8,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2022

Tabel 1.6 persentase PDRB Kabupaten Tanah Datar menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan penghasil Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar diantara sektor ekonomi lainnya. Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 sebesar 27,81%, namun presentase tersebut turun dari tahun 2021 yaitu 29,81%, sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar. 2023. Produk Domestik Bruto Kabupaten Tanah Datar Menurut Lapangan Usaha. Hal 93

motor menyumbang 13,89% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Tahun 2022.

Namun sektor pertanian di Kabupaten Tanah Datar masih menghadapi beberapa kendala dan permasalahan yang salah satunya berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Salah satu kendala yang ditemukan oleh Eka Putra, S.E. dan Rich Aprian, S.H., M.H. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar saat ini dari aspirasi Masyarakat saat mengunjungi petani. Pada kunjungan lapangan terlihat bahwa para petani mempunyai kendala dalam biaya mengelola/membajak lahan pertaniannya. Kendala biaya pengelolaan lahan, seperti biaya pembajakan dan antrian pemilik sawah menunggu jadwal operator, dapat berdampak pada terganggunya siklus tanam dan tertundanya proses produksi¹¹.

Selain itu, terdapat permasalahan petani yang susah mendapatkan pupuk subsidi membuat hasil panen yang tidak maksimal. Sulitnya petani mendapatkan pupuk subsidi membuat petani mencari cara lain dengan membeli pupuk non subsidi yang memiliki harga yang relatif lebih mahal, sebagaimana yang disampaikan petani Jorong Mandailing, Nagari Pagaruyung berikut ini¹²:

“Dengan modal yang terbatas terpaksa kami membeli pupuk nonsubsidi, dimana harga tag sangat mahal dan mencari pupuknya juga susah. Tentunya dengan modal yang demikian dan harga pupuk yang mahal maka jumlah pupuk yang kami peroleh menjadi berkurang. Dan

¹¹Bajak Gratis : "Begitu Nama Programnya Kami (EKA-RICHI) Berikan. Yaitu Pemberian...", <https://tanahdatar.go.id/berita/6074/bajak-gratis-begitu-nama-programnya-kami-eka-richi-berikan-yaitu-pemberian-bantuan-membajak-sawah-masyarakat-tanah-datar-secara-gratis-alias-tidak-dipungut-biaya.html>, diakses pada 26 Januari 2023, pukul 18.00 WIB

¹²Fokussumatera.com : “Susah Mendapat Pupuk Bersubsidi, Petani di Tanah Datar Keluhkan Hasil Panen Tak Maksimal”, <https://www.fokussumatera.com/2020/03/susah-mendapat-pupuk-bersubsidi-petani.html?m=1>, diakses pada 01 September 2023, 09.30 WIB

jumlah tersebut tentu tidak cukup untuk kebutuhan tanaman kami”.(Hasil wawancara fokussumatera.com dengan Petani Jorong Mandailing, Nagari Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar pada Jum’at, 6 Maret 2020)

Sejalan dengan pernyataan petani Jorong Mandailing, Nagari Pagaruyung dengan wawancara peneliti dengan petani Jorong Koto Kaciek, Nagari Pangian berikut ini¹³:

“Permasalahan petani yang pertama kali mencari pupuk subsidi yang sulit. Selain itu, harga pupuk non subsidi yang ada tidak terjangkau oleh petani. Selanjutnya pupuk subsidi tersedia ketika petani tidak ke sawah”. (Hasil wawancara Ketua Kelompok Tani Pulau Koto, Jorong Koto Kaciek, Nagari Pangian pada hari Rabu, 20 Februari 2024, pukul 14.00-14.50 WIB)

Berdasarkan pernyataan kedua petani di atas dapat dipahami bahwa petani masih sulit mendapatkan pupuk subsidi dan sering kali pupuk subsidi tersedia di saat petani tidak ke sawah. Mengatasi masalah tersebut, petani mencoba cari solusi atas permasalahan tersebut mendorong petani untuk membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang cukup tinggi dan mempengaruhi hasil panen padi.

Permasalahan lain yang dihadapi petani di Kabupaten Tanah Datar yaitu hama tanaman yang menyerang tidak dipahami oleh petani solusi penanganannya, sebagaimana yang disampaikan oleh petani Jorong Bukit Barisan, Nagari Tigo Jangko berikut¹⁴:

¹³ Wawancara Ketua Kelompok Tani Pulau Koto, Jorong Koto Kaciek, Nagari Pangian pada hari Rabu, 20 Februari 2024, pukul 14.00-14.50 WIB

¹⁴ Wawancara Ketua Kelompok Tani Bukit Barisan, Jorong Bukit Barisan, Nagari Tigo Jangko pada hari Rabu, 6 Februari 2024, pukul 14.10-14.30 WIB

“Hama yang menyerang tanaman padi kadang-kadang tidak dimengerti oleh petani. Ini hama nya ini obat racunnya. Contohnya sekarang ada hama yang menyerang tanaman padi bapak, banyak daun dari padi ini putih-putih, setengah dari daun padi itu yang putih-putih ”. (Hasil wawancara Ketua Kelompok Tani Bukit Barisan, Jorong Bukit Barisan, Nagari Tigo Jangko pada hari Rabu, 6 Februari 2024, pukul 14.10-14.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa petani belum memahami jenis hama apa saja yang menyerang tanaman padinya. Kendala tersebut mengalami keterlambatan penanganan langsung disebabkan kurangnya petugas POPT Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana yang dikatakan oleh Petugas OPT Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar¹⁵:

“...di masing-masing kecamatan kita memiliki petugas POPT ada 1 orang. Namun, kondisi saat ini secara resmi petugas POPT Kabupaten Tanah Datar hanya ada 2 orang yang wilayah kerja dibagi menjadi 2 yaitu satu petugas POPT memegang 7 kecamatan. Wilayah kerja yang luas tidak memungkinkan untuk memantau seluruh kecamatan. Oleh sebab itu, petugas POPT menerima hasil laporan dari penyuluh nagari sesuai wilayah binaan tentang hama yang menyerang, nantinya petugas POPT akan meninjau lahan yang terindikasi hama tanaman”. (Hasil wawancara Hafnilailatul Basri, S.P Petugas OPT Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar pada hari Rabu, 1 Februari 2024, pukul 14.10-14.45 WIB)

Dari hasil wawancara dapat diketahui diketahui penanganan awal terhadap hama tanaman yang menyerang diketahui melalui penyuluh pertanian di nagari dan ditindaklanjuti oleh petugas POPT yang secara resmi hanya ada 2 orang dengan cakupan wilayah yang luas, dimana tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Tanah

¹⁵ Wawancara Hafnilailatul Basri, S.P Petugas OPT Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar pada hari Rabu, 1 Februari 2024, pukul 14.10-14.45 WIB

Datar. Hal tersebut menjadi salah satu latar belakang petani tidak cepat tanggap terhadap permasalahan hama yang terjadi.

Selain itu, kendala lain dalam peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Tanah Datar adalah 17.000 hektar atau 70% lahan pertanian di Kabupaten Tanah Datar merupakan lahan tadah hujan sehingga membuat pertanian bergantung pada kondisi cuaca. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Operasi Bajak Bebas (PPTK) Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut¹⁶:

“Kabupaten Tanah Datar memiliki 70% lahan sawah tadah hujan yaitu 15.000 hektar dari 22.000 hektar lahan sawah sehingga hasil produksi pertanian di Kabupaten Tanah Datar dipengaruhi faktor cuaca” (Hasil wawancara awal dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bajak Gratis Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar pada hari Selasa 28 Februari 2023, pukul 15.00-16.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa selain kendala teknis seperti ketersediaan alsintan dan modal, sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi, Kabupaten Tanah Datar juga mengalami kendala non teknis yaitu faktor cuaca yang mempengaruhi masa tanam dan hasil sektor pertanian. Contoh faktor cuaca yang mempengaruhi hasil pertanian di Kabupaten Tanah Datar adalah yang terjadi di Nagari Barulak Kabupaten Tanjung Baru. Cuaca kemarau yang terjadi kurang lebih 1

¹⁶ Wawancara awal dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bajak Gratis Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar pada hari Selasa 28 Februari 2023, pukul 15.00-16.00 WIB

bulan mengakibatkan sawah milik petani menjadi tidak ada air dan terancam gagal panen, sebagaimana gambar berikut ini¹⁷ :

Gambar 1.1 Kondisi Sawah yang Kering



Sumber : Padangkita.com Tahun 2022

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa tanah di persawahan para petani sangat kering sehingga menyebabkan terbentuknya retakan-retakan yang mengancam kegagalan panen tanaman padi. Kondisi keringnya sawah milik petani juga dampak dari adanya kerusakan saluran irigasi. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan petani Nagari Barulak berikut ini¹⁸ :

“Dulu saluran irigasi kami ada, namun sudah rusak dan tak kunjung diperbaiki” (Hasil wawancara antara Sumbar.jpnn.com dengan Petani Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar pada Sabtu, 02 April 2022)

¹⁷Padangkita.com : “Sawah di Tanah Datar Kekeringan, Pemkab Imbau Petani Ikut AUTP”, <https://padangkita.com/sawah-di-tanah-datar-kekeringan-pemkab-imbau-petani-ikut-autp/> diakses pada 06 September 2023, pukul 06.37 WIB

¹⁸ Sumbar.jpnn.com : “Masalah Sudah Menahun, Kini Petani di Tanah Datar Terancam Gagal Panen”, <https://sumbar.jpnn.com/sumbar-terkini/456/masalah-sudah-menahun-kini-petani-di-tanah-datar-terancam-gagal-panen?page=2>, diakses pada 06 September 2023, pukul 06.34 WIB

Selanjutnya dari pernyataan petani dapat dipahami bahwa petani sebenarnya memiliki irigasi namun kondisinya rusak. Jika irigasi yang dekat sawah milik petani dalam kondisi baik mungkin hal tersebut bisa menjadi salah satu solusi dari cuaca kemarau yang melanda Nagari Barulak. Selain itu, adanya faktor bencana alam juga bisa mempengaruhi pertanian di Kabupaten Tanah Datar seperti erupsi Gunung Marapi, sebagaimana gambar 1.2 berikut ini¹⁹ :

Gambar 1.2 Dampak Erupsi Gunung Marapi



Sumber: tirasonline.com Tahun 2024

Dari gambar 1.2 menunjukkan dampak dari erupsi Gunung Marapi yang menyebabkan petani menjadi gagal panen sehingga mengalami kerugian. Terdapat kendala dan permasalahan pada sektor pertanian, dan sektor pertanian menyumbang sebagian besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tanah Datar, sehingga pembangunan pertanian menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

¹⁹ tirasonline.com : “Marapi Erupsi, Petani di X Koto Tak Bisa Beraktivitas, Pemkab Tanah Datar ke mana?”, <https://www.tirasonline.com/2024/01/marapi-erupsi-petani-di-x-koto-tak-bisa-beraktivitas-pemkab-tanah-datar-ke-mana/>, diakses pada 29 April 2024, pukul 08.00 WIB

Terdapat kendala dan permasalahan pada sektor pertanian dan besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar, sehingga pembangunan pertanian menjadi prioritas pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 yaitu Visi Kabupaten Tanah Datar “terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang berlandaskan Adat *Basandi syara’ syara’ Basandi Kitabullah*” dan misi ke-2 “meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja berbasis pertanian, industri dan UMKM”²⁰. Selain itu, visi dan misi tersebut dituangkan dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sektor pertanian yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian (Renstra) Kabupaten Tanah Datar seperti terlihat pada Tabel 1.7 di bawah ini:

Tabel 1.7 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya produksi pertanian	Meningkatkan produktivitas pertanian	Meningkatkan AUTP dan AUTS
	Meningkatnya efisiensi pertanian	Meningkatkan efisiensi produksi pertanian	Memberikan bantuan bajak gratis

Sumber: Rencana Strategi Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel 1.7 tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar menunjukkan bahwa Dinas Pertanian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dari fenomena empiris ini dapat dipahami bahwa

²⁰Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026, hal V-4

fenomena tersebut sejalan dengan salah satu tipe strategi menurut J. Kotten yaitu strategi organisasi. Strategi organisasi adalah strategi yang berkaitan dengan visi, misi, tujuan, nilai-nilai inisiatif strategis baru yang terkait dengan apa yang harus dilakukan dan tujuan operasional/program untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Salah satu cara meningkatkan kinerja organisasi dengan tujuan yang dimiliki oleh Dinas Pertanian, tujuan yang dimiliki diturunkan menjadi arah kebijakan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian mencanangkan beberapa program unggulan yang lebih baik diantaranya meningkatkan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), memberikan bantuan bajak gratis, program lainnya seperti pembangunan dan rehabilitasi sarana irigasi serta peningkatan kuota pupuk bersubsidi.

Program unggulan pertama yaitu program bajak gratis. Program bajak gratis merupakan program yang berfokus memberikan jasa membajak sawah bukan hanya memberikan bantuan pemberian atau peminjaman alat dan mesin pertanian kepada petani. Program ini dikelola dengan sistem kolaborasi menggunakan manajemen brigade alsintan. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bajak Gratis menjelaskan bahwa brigade alsintan adalah suatu lembaga sebagai penyedia jasa alsintan pertanian

di Kabupaten Tanah Datar²¹. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan berikut ini ²²:

“Brigade alsintan merupakan lembaga yang berada dibawah Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar. SK brigade alsintan yaitu sk yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten Tanah Datar. Dibentuk struktur tersendiri untuk pelaksanaan program bajak gratis mulai dari tenaga administrasi tingkat Kabupaten Tanah Datar hingga ke tingkat Nagari”. (Hasil wawancara awal dengan Kepala Bidang Prasarana sarana dan penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar pada hari Selasa 28 Februari 2023, pukul 15.00-16.00 WIB)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dibentuk struktur tersendiri di bawah tanggung jawab Dinas Pertanian untuk memfasilitasi pelaksanaan program, salah satunya adanya tenaga administrasi di Kabupaten Tanah Datar. Pegawai yang bekerja sebagai tenaga administrasi berasal dari rekrutmen yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar. Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) di bawah ini²³:

“Kami melakukan rekrutmen pegawai non pns dengan kontrak yang diperpanjang setiap 1 tahun, seperti kontrak tahun 2022 yang habis tinggal kami lakukan perpanjangan kontrak”. (Hasil wawancara dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bajak Gratis Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar pada hari Selasa 5 Juni 2023, pukul 11.00-12.00 WIB)

Dari pernyataan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Bajak Gratis tersebut dapat dipahami bahwa tim brigade alsintan merupakan pegawai non

²¹ Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bajak Gratis

²² Wawancara awal dengan Kepala Bidang Prasarana sarana dan penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar pada hari Selasa 28 Februari 2023, pukul 15.00-16.00 WIB

²³ Wawancara dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bajak Gratis Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar pada hari Selasa 5 Juni 2023, pukul 11.00-12.00 WIB

pns yang di rekrutmen dengan kontrak dan diperpanjang setiap tahun sekali. Kemudian ada manajer tiap kecamatan.

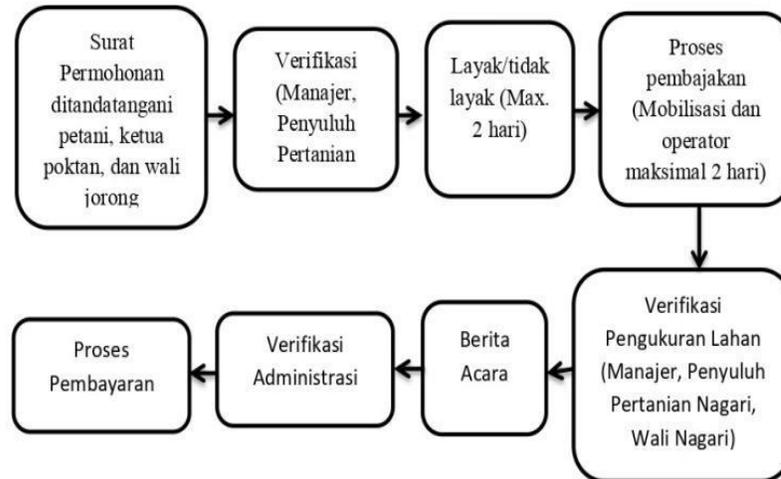
Selain itu, pelaksanaan program bajak gratis ini menargetkan para petani di 14 kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Kelompok tani yang memperoleh manfaat dari Program Bajak Gratis diantaranya yaitu kelompok tani uspenma, kelompok tani pulau koto, dan kelompok tani bukit barisan yang ada di Kecamatan Lintau Buo. Kelompok tani pulau koto merupakan salah satu pionir pelaksanaan program unggulan di Nagari Pangian, Kecamatan Lintau Buo, sebagaimana yang disampaikan oleh ketua kelompok tani pulau koto berikut ini:

“Bapak merupakan ketua kelompok tani pulau koto dan salah satu pionir pelaksanaan program bajak gratis untuk Nagari Pangian. Jadi bapak memahami dengan baik bagaimana teknis pelaksanaan program bajak gratis, diantaranya adanya pola bantuan yang diberikan”. (Hasil wawancara Ketua Kelompok Tani Pulau Koto, Jorong Koto Kaciek, Nagari Pangian pada hari Rabu, 20 Februari 2024, pukul 14.00-14.50 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa ketua kelompok tani Pulau Koto merupakan salah satu orang pertama yang mendapat dukungan untuk melaksanakan program membajak gratis di Nagari Pangian. Hal tersebut dapat dilihat dari ketua kelompok tani pulau koto yang memahami bahwa program bajak gratis memiliki pola bantuan yang diberikan. Pelaksanaan program bajak gratis yaitu mulai

dari petani mengajukan permohonan kepada Dinas Pertanian, sebagaimana alur pelaksanaan program berikut ini²⁴:

Gambar 1.3 Alur Pelaksanaan Program Bajak Gratis



Sumber : Petunjuk Pelaksanaan Layanan Bajak Gratis Tahun Anggaran 2022

Sesuai dengan gambar 1.3 alur pelaksanaan program bajak gratis bahwa adanya proses verifikasi layak atau tidaknya petani mendapat bantuan serta menentukan pola bantuan yang diterima petani jika layak mendapatkan bantuan. Verifikasi syarat dan pola bantuan sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bajak Gratis. Bantuan yang diterima oleh petani seperti mendapatkan peminjaman alat dan mesin pertanian (alsintan) serta seluruh pembiayaan mendapatkan dana bantuan yang berasal dari

²⁴ Olahan Peneliti dari Petunjuk Pelaksanaan Layanan Bajak Gratis Tahun Anggaran 2022

anggaran APBD Kabupaten Tanah Datar, seperti yang disampaikan dibawah ini oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Kegiatan)²⁵:

“...kalau dari segi dana atau anggaran itu berasal dari APBD Kabupaten Tanah Datar yang nantinya akan digunakan untuk pemeliharaan alsintan, pembayaran operator, dan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) karena program ini salah satu program unggulan Kabupaten Tanah Datar” (Hasil wawancara awal dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bajak Gratis Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar pada hari Selasa, 28 Februari 2023, pukul 15.00-16.00 WIB)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa anggaran yang tersedia digunakan secara optimal untuk perawatan alsintan seperti perbaikan alsintan yang rusak, pembayaran operator, dan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM). Oleh sebab itu, dibuat target minimal berapa hektar setiap tahun dan petani yang tahun sebelumnya telah memperoleh bantuan, pada tahun berikutnya untuk tidak ikut mengajukan bantuan agar petani yang belum bisa mendapatkan bantuan sebelumnya bisa mendapat bantuan juga.

Program selanjutnya adalah Asuransi Usaha Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS). Program unggulan AUTP dan AUTS merupakan program yang fokus melindungi petani/kelompok tani padi yang mengalami gagal panen akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan bencana alam, serta petani yang mengalami kematian, kecelakaan dan kehilangan hewan ternak.

Kedua program unggulan ini di Kabupaten Tanah Datar sudah ada sebelum masuk ke dalam 10 program unggulan. Perbedaan program AUTP dan AUTS

²⁵ Wawancara awal dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bajak Gratis Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar pada hari Selasa, 28 Februari 2023, pukul 15.00-16.00 WIB

sebelum masuk ke dalam program unggulan Kabupaten Tanah Datar dan setelah masuk yaitu sumber pembiayaan, sebagaimana yang disampaikan oleh Pengawas Benih Tanaman Bidang Tanaman Pangan berikut²⁶:

“sejak program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) masuk program unggulan, sumber pembiayaan 80% dari APBN dan 20% yang sebelumnya berasal dari petani, saat ini dibayarkan dari APBD Kabupaten Tanah Datar”. (Hasil wawancara dengan Pengawas Benih Tanaman Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar pada hari Kamis, 7 September 2023, pukul 10.30-11.10 WIB)

Dari wawancara tersebut terlihat bahwa petani yang terdaftar sebagai penerima premi asuransi AUTP tidak lagi membayar premi asuransi karena dibayarkan dari APBD Kabupaten Tanah Datar. Hal serupa juga terjadi pada program Asuransi Usaha Ternak (AUTS), sebagaimana disampaikan oleh Pengawas Mutu Pertanian Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berikut²⁷:

“... sama seperti program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), di program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) sumber pembiayaannya berasal dari 80% APBN dan 20% yang sebelumnya berasal dari peternak sapi, saat ini dibayarkan dari APBD Kabupaten Tanah Datar”. (Hasil wawancara dengan Pengawas Mutu Pertanian Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar pada hari Kamis, 7 September 2023, pukul 10.30-11.10 WIB)

Berdasarkan wawancara terlihat bahwa peternak sapi tidak lagi membayar premi asuransi sebesar 20% yang sebelumnya dibayarkan oleh peternak sapi. Petani

²⁶ Wawancara dengan Pengawas Benih Tanaman Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar pada hari Kamis, 7 September 2023, pukul 10.30-11.10 WIB

²⁷ wawancara dengan Pengawas Mutu Pertanian Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar pada hari Kamis, 7 September 2023, pukul 10.30-11.10 WIB

padi dan peternak sapi yang dapat melakukan pendaftaran sebagai peserta dari program AOTP dan AUTS dengan syarat sebagai berikut:

1. Tanaman padi yang berumur maksimal 30 (tiga puluh hari) hst dengan metode semai
2. Sapi harus betina
3. Umur produktif yaitu 1-8 th

Petani ternak yang dapat mengikuti Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) didaftarkan dan diidentifikasi oleh tim teknis AOTP Sektor Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, serta penyuluh pertanian dan petugas POPT Kabupaten Tanah Datar. Tim tersebut akan melakukan sosialisasi dan pendaftaran petani sebagai peserta polis asuransi AOTP hingga menginput formulir pendaftaran ke dalam aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP).

Dalam pelaksanaan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) dan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar bekerja sama dengan PT. Asuransi Jasindo, sebagaimana yang disampaikan oleh Pengawas Mutu Pertanian Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berikut²⁸:

“Program Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) melakukan kerjasama dengan PT. Asuransi Jasindo. Namun, yang berbeda hanya Surat Perjanjian Kerjasama (PKS)”. (Hasil wawancara dengan Pengawas Mutu Pertanian Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar pada hari Kamis, 7 September 2023, pukul 10.30-11.10 WIB)

²⁸ Wawancara dengan Pengawas Mutu Pertanian Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar pada hari Kamis, 7 September 2023, pukul 10.30-11.10 WIB

Program unggulan terakhir yaitu pembangunan dan rehabilitasi irigasi. Pembangunan dan rehabilitasi irigasi merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk meningkatkan produksi pertanian melalui pengembangan jaringan irigasi yang baik. Namun program Pembangunan dan rehabilitasi irigasi yang menjadi wewenang Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar hanya irigasi tersier atau irigasi tingkat usaha tani, irigasi kuarter dan jaringan irigasi biasa.

Hal ini didasarkan pada fakta bahwa sebagian besar wewenang irigasi berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana dikemukakan Analis Pasar Hasil Pertanian Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan berikut:

“Program terkait irigasi sebenarnya sudah ada sejak lama dan wewenang irigasi ini banyak berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan untuk irigasi yang menjadi wewenang Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar hanya irigasi tersier, kuarter dan irigasi biasa”. (Hasil wawancara dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Bidang Prasarana sarana dan penyuluhan pada hari Kamis, 7 September 2023, pukul 10.30-11.10 WIB²⁹)

Pernyataan dari Analis Pasar Hasil Pertanian Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar tersebut sejalan dengan dokumen teknis pengembangan jaringan irigasi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan, pembangunan dan

²⁹ wawancara dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Bidang Prasarana sarana dan penyuluhan pada hari Kamis, 7 September 2023, pukul 10.30-11.10 WIB

rehabilitasi jaringan irigasi pada tingkat usaha tani, seperti: jaringan irigasi tersier adalah kewenangan tingkat daerah/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian, yaitu Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Namun, program unggulan peningkatan pupuk subsidi berbeda dengan program unggulan sektor pertanian lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya oleh peneliti. Program peningkatan pupuk subsidi memiliki regulasi seperti SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian untuk pelaksanaan program, Sedangkan program unggulan lainnya seperti program bajak gratis, program AOTP dan AOTS diatur dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar bahkan dibentuk tim untuk melaksanakan program tersebut.

Aturan lain yang dikeluarkan Bupati Kabupaten Tanah Datar tentang program peningkatan pupuk subsidi tidak ada. Kemudian ada kendala dalam penyaluran pupuk bersubsidi, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar saat diwawancarai Padangkita bahwa kendala penyaluran tersebut disebabkan oleh Bank Mandiri sebagai penyedia jasa yang belum siap 100%. kebutuhan mesin Elektronik Data Capture(EDC) dan kartu petani³⁰.

Berdasarkan fenomena empiris yang peneliti jelaskan sebelumnya dapat dilihat bahwa tidak semua program unggulan memiliki SOP dan regulasi yang dirumuskan oleh Dinas Pertanian dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Dalam hal

³⁰ Padangkita : “Penyaluran Pupuk Subsidi di Tanah Datar Terganggu, Ini Penjelasan dari Dinas Pertanian”, <https://padangkita.com/penyaluran-pupuk-bersubsidi-di-tanah-datar-terganggu-ini-penjelasan-dari-dinas-pertanian/>, diakses pada 4 Oktober 2023, pukul 14.00 WIB.

ini hanya program bajak gratis yang memiliki SOP dan regulasi tersebut. Fenomena tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan tipe kelembagaan menurut J. Kotten. Strategi kelembagaan adalah strategi yang menitikberatkan pada pengembangan organisasi dengan memperhatikan struktur organisasi, mandat kebijakan dan SOP organisasi sehingga dapat lebih mudah mengembangkan kemampuan dalam melaksanakan program/tujuan organisasi.

Kemudian guna mendukung kegiatan dari salah satu program unggulan yaitu program bajak gratis, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar membuat aplikasi bajak gratis yang berisi informasi umum berupa website yang dapat diakses oleh petani dengan mengakses link <https://bajak-gratis.tanahdatar.go.id/>, sebagaimana tampilan berikut ini:



Gambar 1.4 Tampilan Layar Bajak Gratis

Sumber : Aplikasi WEB Bajak Gratis Tahun 2023

Gambar 1.4 tersebut menunjukkan bahwa masyarakat terutama petani mampu memperoleh secara online melalui website tersebut yang berisi informasi umum seperti tujuan dan target kegiatan, tersedianya sop kegiatan, dokumentasi kegiatan

bajak gratis. Selain melalui aplikasi tersebut, Dinas pertanian juga melakukan sosialisasi langsung ke petani, sebagaimana gambar berikut ini:

Gambar 1.5 Sosialisasi Program Bajak Gratis



Sumber : Dokumentasi Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

Gambar 1.5 menunjukkan bahwa sedang berlangsung sosialisasi di salah satu kecamatan yaitu Kecamatan Lintau Buo agar masyarakat pada Kecamatan tersebut mengenal seperti apa program unggulan bajak gratis serta bagaimana pelaksanaan program tersebut. Selajutnya melihat faktor daerah yang sebagian besar lahan pertanian serta berperan aktif dalam meningkatkan sektor pertanian, sehingga Bupati Tanah Datar yaitu Eka Putra, S.E, M.M berhasil meraih Penghargaan sebagai Kepala Daerah atas komitmennya dalam aktif mendukung dan mensukseskan sektor pertanian di Kabupaten Tanah Datar seperti terlihat pada Gambar 1.6 berikut:

Gambar 1.6 Penghargaan Bupati Kabupaten Tanah Datar



Sumber : tanahdatar.go.id Tahun 2023

Pada gambar 1.6 terlihat bahwa acara penyerahan penghargaan diwakili oleh prof. Dedi Nursyamsi sebagai Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Pertanian RI pada acara Pekan Petani Nelayan Indonesia (Penas) XVI di Lanud Tabing, Padang, Sumatera Barat. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) kepada para Kepala Daerah yang berkiprah dan ikut memajukan keberhasilan sektor pertanian di daerahnya masing-masing³¹.

Selain itu, melalui salah satu program unggulan yaitu program bajak gratis, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memperoleh Penghargaan Pembangunan Daerah

³¹Tanahdatar.go.id : “Serius Dukung Sektor Pertanian, Bupati Eka Putra Raih Penghargaan” Foto Pemerintah Kabupaten Tanah Datar - Serius Dukung Sektor Pertanian, Bupati Eka Putra Raih Penghargaan, diakses pada 17 Juni 2023, pukul 14.50 WIB

(PPD) terbaik pertama se-Sumatera Barat Tahun 2023³², sebagaimana gambar 1.7 berikut ini :

Gambar 1.7 Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten Tanah Datar



Sumber : tanahdatar.go.id Tahun 2023

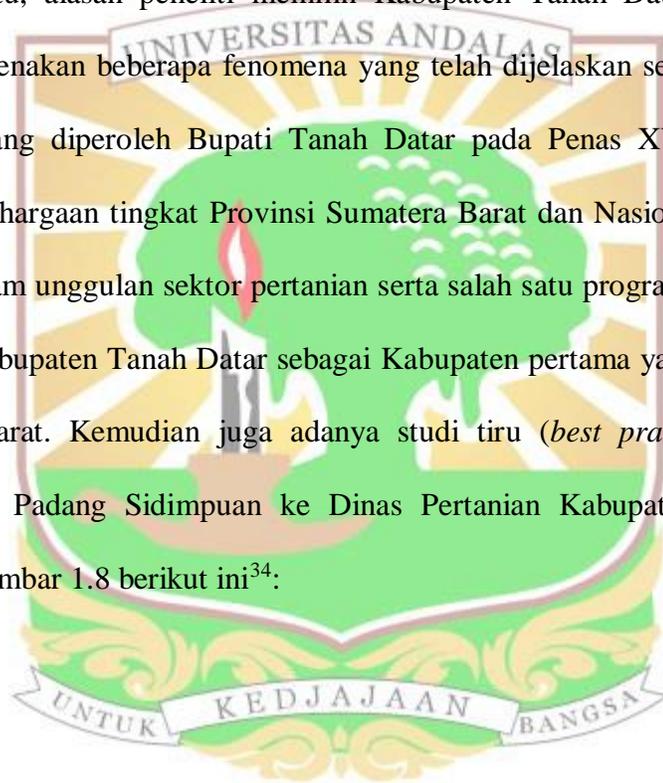
Pada Gambar 1.7 dapat dilihat penyerahan Penghargaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar diberikan secara langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah pada Musyawarah Perencanaan (Musrenbang) Dokumen Perencanaan Tahunan (RKPD) Tahun 2024 di Padang langsung kepada Bupati Kabupaten Tanah Datar Eka Putra, S.E., M.M.

Selain meraih penghargaan di tingkat Provinsi, melalui program unggulan bajak gratis, Kabupaten Tanah Datar juga menjadi salah satu daerah di Sumatera Barat yang mewakili Provinsi Sumatera Barat pada Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat Daerah/Kota yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan

³²Tanahdatar.go.id : "Terbaik Tingkat Provinsi, Bupati Tanah Datar Terima Penghargaan Pembangunan" Berita Pemerintah Kabupaten Tanah Datar - Terbaik Tingkat Provinsi, Bupati Tanah Datar Terima Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 dari Gubernur Sumatera Barat, diakses pada 26 Maret 2023, pukul 15.00 WIB

Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia dan mendapat peringkat kelima se-Indonesia³³. Dari beberapa penghargaan yang diperoleh oleh Kabupaten Tanah Datar, peneliti ingin melihat dari keberhasilan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar dalam pelaksanaan beberapa program unggulan sektor pertanian di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Selain itu, alasan peneliti memilih Kabupaten Tanah Datar sebagai lokus penelitian dikarenakan beberapa fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya seperti penghargaan yang diperoleh Bupati Tanah Datar pada Penas XVI Tani Nelayan Indonesia, penghargaan tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, meluncurkan beberapa program unggulan sektor pertanian serta salah satu program unggulan yaitu bajak gratis. Kabupaten Tanah Datar sebagai Kabupaten pertama yang melaksanakan di Sumatera Barat. Kemudian juga adanya studi tiru (*best practice*) dari Dinas Pertanian Kota Padang Sidempuan ke Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana gambar 1.8 berikut ini³⁴:



³³Prokopim_tanahdatar : “Menjadi Terbaik Kelima Tingkat Nasional”, https://www.instagram.com/p/CsS_jdGPz4H/?igsh=cHpzcm40MmJjeDJ6, diakses pada 17 Mei 2023, pukul 09.56 WIB

³⁴ Jurnalsumbar.com : “Dinas Pertanian Padang Sidempuan Pelajari Pelajari Bajak Gratis Tanah Datar”, <https://jurnalsumbar.com/2023/06/dinas-pertanian-padang-sidempuan-pelajari-bajak-gratis-tanah-datar/>, diakses tanggal 30 November 2023, pukul 15.43 WIB

Gambar 1.8 Studi Tiru (*best practice*) dari Dinas Pertanian Kota Padang Sidimpuan



Sumber : jurnalsumbar.com Tahun 2023

Gambar 1.8 studi tiru studi tiru (*best practice*) dari Dinas Pertanian Kota Padang Sidimpuan ke Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar berkaitan dengan teknologi pertanian yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada program bajak gratis. Kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh dukungan dari DPRD Kota Padang Sidimpuan agar program bajak gratis dapat diterapkan di Pemerintah Kota Padang Sidimpuan.

Berdasarkan fenomena empiris dan teoritis yang telah peneliti jelaskan sebelumnya dapat dilihat bahwa ada dua tipe strategi dari empat tipe-tipe strategi. Dari dua tipe tersebut masih belum semuanya sejalan dengan tipe strategi menurut J. Kotten dan perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan di lapangan khususnya dalam pelaksanaan program unggulan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Dinas Pertanian dalam Pelaksanaan Program Unggulan Sektor Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti sebelumnya, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana strategi Dinas Pertanian dalam pelaksanaan program unggulan sektor pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi Dinas Pertanian dalam pelaksanaan program unggulan sektor pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat dilihat bahwa manfaat penelitian yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis yaitu melalui sumbangan teori menggunakan analisis dari tipe-tipe strategi untuk kajian administrasi yaitu strategi Dinas Pertanian dalam pelaksanaan program unggulan sektor pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar agar bisa melakukan perbaikan terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan unggulan pada sektor pertanian.